



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL, LAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO  
**SUB UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARUM KUSUMAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3. NHK : 468220

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>365.000.000</b>
1. Tanah Seluas 366 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/81 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>80.500.000</b>
1. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI MOTOR BEBEK Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
3. MOTOR, HONDA 2013 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
4. MOTOR, HONDA MOTOR MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>29.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>351.432.645</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>825.932.645</b>



III. HUTANG

Rp.

171.918.365

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

654.014.280

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 September 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.